



Etika Administrasi Publik Pilar Utama Kepercayaan Masyarakat

Public Administration Ethics is the Main Pillar of Public Trust

Taufiqurokhman Taufiqurokhman* & Zalfa Zafirah Rossa

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universtas Muhammdiyah Jakarta
Jalan K. H Ahmad Dahlan, Cirendeui, Banten 15419, Indonesia

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan pentingnya layanan administrasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penelitian ini penting dilakukan untuk memperkuat penerapan prinsip etika dalam administrasi publik sebagai dasar terciptanya pelayanan yang berkualitas dan terpercaya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan etika dalam administrasi publik serta merumuskan strategi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar etika tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, melalui pengumpulan data dari jurnal, buku, dan karya ilmiah terindeks secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, budaya organisasi, regulasi yang ketat, serta partisipasi aktif masyarakat. Temuan ini menyimpulkan bahwa pendekatan etika mampu memperkuat integritas, memperluas akuntabilitas, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa administrasi publik berbasis etika dapat menghasilkan kebijakan yang lebih representatif, adil, dan diterima secara luas. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan literatur administrasi publik dan menawarkan panduan praktis untuk mendorong reformasi birokrasi berbasis etika di Indonesia.

Kata Kunci: Etika Administrasi Publik, Pilar Utama, Kepercayaan Masyarakat

Abstract

The enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2014 concerning Government Administration emphasizes the importance of transparent, accountable, and equitable public administration services. This research is essential to strengthen the application of ethical principles in public administration as a basis for creating quality and reliable services. This research aims to identify factors that influence the application of ethics in public administration and formulate strategies to improve compliance with these ethical standards. The research method systematically uses a qualitative approach with literature studies, through data collection from journals, books, and indexed scientific works. The study results indicate that leadership factors, organizational culture, strict regulations, and active community participation influence the application of ethics. These findings conclude that an ethical approach can strengthen integrity, expand accountability, and encourage community involvement in public decision-making. The implications of these findings emphasize that ethics-based public administration can produce more representative, fair, and widely accepted policies. This research makes an important contribution to developing public administration literature and offers practical guidance to encourage ethics-based bureaucratic reform in Indonesia.

Keywords: Public Administration Ethics; Main Pillars; Public Trust

How to Cite: Taufiqurokhman, T., & Rossa, Z.Z. (2025). Etika Administrasi Sebagai Pilar Esensial Dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2024: 1-13

PENDAHULUAN

Administrasi publik merupakan bidang ilmu yang membahas fungsi dan peran lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Administrasi publik tidak hanya berfokus pada pemerintahan, tetapi juga bertujuan untuk memastikan pelayanan publik yang adil, efektif, dan transparan (Panjaitan & Pardede, 2021). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah rendahnya kepatuhan terhadap prinsip etika dalam administrasi publik yang menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Heynes, 1986:01). Gap penelitian ini terletak pada ketidaksesuaian antara harapan akan penyelenggaraan administrasi publik yang berbasis etika tinggi dengan kenyataan adanya praktik administrasi yang cenderung pragmatis dan kurang berlandaskan prinsip moral.

Penelitian ini menawarkan temuan baru (novelty) berupa identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penerapan etika, serta perumusan strategi peningkatan integritas administrasi publik berbasis partisipasi masyarakat dan budaya organisasi (Hanekom, 1984:58). Pentingnya etika dalam administrasi publik menjadi kunci dalam membangun pemerintahan yang berintegritas, adil, dan akuntabel. Etika berfungsi sebagai standar moral yang menilai setiap tindakan penyelenggara negara, memastikan bahwa kepentingan publik selalu menjadi prioritas utama (Syariah & Ilmu, n.d. 2016). Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan etika dalam administrasi publik, dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar etika administrasi publik?"

Pelayanan publik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, sering kali kita sebagai masyarakat menilai adanya pelanggaran-pelanggaran pelayanan publik yang kerap terjadi di sekitar kita. Berdasarkan hasil audiens berdasarkan beberapa pemangku kepentingan yakni, komite I DPR RI tahun 2017 menyimpulkan bahwa banyaknya kasus-kasus pelanggaran etika yang kerap terjadi pada ruang lingkup pemerintahan. Pelanggaran etika yang dimaksud dapat berupa kebohongan publik, degradasi moral, penyalahgunaan wewenang, pembuatan kebijakan yang memboroskan sumber daya, hingga perlakuan diskriminatif (Purnama, 2023).

Hal ini dapat disebabkan oleh faktor rendahnya kesadaran akan hukum pejabat publik serta ketidaksiapan para aparatur negara dalam menghadapi transformasi yang terjadi (Anggraeni, 2023). Pelaksanaan pelayanan publik yang tidak efektif akan menimbulkan adanya maladministrasi, bentuk dari maladministrasi sendiri dapat berupa melalaikan kewajiban, penundaan berlarut-larut, hingga menciptakan adanya nepotisme, kolusi dan korupsi. Tentu maladministrasi yang terjadi di ruang lingkup instansi pemerintahan menjadi faktor utama timbulnya masalah korupsi (Margareth, 2017).

Etika publik memiliki peran penting dalam memperkuat kesadaran etika tidak hanya di lingkungan birokrasi pemerintahan, tetapi juga di lembaga-lembaga politik dan institusi negara lainnya. Ini menjadi krusial mengingat bahwa pelanggaran terhadap etika publik, seperti korupsi, dapat terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, baik dalam konteks politik maupun dalam struktur birokrasi. Dengan menerapkan etika publik secara menyeluruh, diharapkan akan tercipta lingkungan di mana nilai-nilai moral dan integritas ditegakkan secara konsisten di seluruh sektor pemerintahan. Pentingnya etika publik juga melibatkan upaya untuk membangun budaya organisasi yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kesadaran akan konsekuensi dari pelanggaran etika dalam pelayanan publik. Selain itu, pendidikan dan pelatihan tentang etika publik juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa para pemimpin dan pegawai pemerintahan memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Faktanya, tingkat korupsi cenderung

meningkat jika tidak ada pedoman etika atau kode etik yang jelas dan diterapkan, atau jika petugas publik tidak mematuhi standar tersebut. Oleh karena itu, memperkuat tata kelola yang etis tidak hanya berdampak pada kepercayaan publik, tetapi juga berperan dalam meminimalkan risiko korupsi dan meningkatkan integritas dalam pemerintahan dan lembaga publik. Dengan demikian, membangun tata kelola yang etis yang kuat merupakan langkah penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi publik (Ikola-Norrbacka et al., 2010: 79).

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, tujuan penulisan ini merujuk terhadap pola pendekatan etika administrasi publik yang sudah harusnya diperhatikan khususnya dalam kalangan pemangku kepentingan pemerintahan. Etika merupakan hal manusiawi yang sudah dimiliki oleh setiap individu, namun etika yang baik tentunya harus dibentuk berdasarkan pendekatan etika yang merupakan bagian dari proses terbentuknya etika yang baik. Apabila hal ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi setiap pemangku kepentingan, tentunya akan berdampak terhadap ruang lingkup administrasi publik baik internal maupun eksternal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur, yang bertujuan untuk memahami konsep, teori, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan etika dalam administrasi publik (Parinata & Puspaningtyas, 2022). Sumber data penelitian diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, laporan kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, dengan memperhatikan kualitas akademik, kredibilitas sumber, dan keterkaitannya dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap database akademik, perpustakaan digital, serta arsip publikasi ilmiah (Dewi Rokhmah, Iken Nafikadini, 2009).

Dalam tahap seleksi sumber, dipilih literatur yang memenuhi kriteria relevansi dengan tema etika administrasi publik dan tingkat kepercayaan masyarakat, serta mempertimbangkan keterbaruan dan otoritas penerbit (Maritza & Taufiqurokhman, 2024). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan mengkategorikan informasi, mendeskripsikan fakta, membandingkan antar penelitian, serta menginterpretasikan temuan untuk membangun kesimpulan yang komprehensif. Pendekatan teoretis yang digunakan berlandaskan pada teori etika administrasi publik dan teori kepercayaan sosial, yang menjadi kerangka konseptual utama dalam analisis (Agus Subagyo, 2020).

Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan berbagai literatur dari perspektif yang berbeda guna menguji konsistensi dan memperkuat validitas temuan. Dengan struktur metode penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi akademik yang kuat dalam pengembangan praktik administrasi publik berbasis etika serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Hasan, 2023).

HASIL PENELITIAN

Urgensi Etika dalam Membangun Kepercayaan Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika dalam administrasi publik merupakan fondasi utama untuk membangun keputusan yang adil dan dapat dipercaya. Temuan ini sejalan dengan pandangan Frederickson (1997) yang menekankan bahwa administrasi publik harus berbasis pada nilai keadilan sosial dan moralitas publik (Eko Yudianto et al., 2024). Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Denhardt dan Denhardt (2000), yang menyoroti pentingnya etika pelayanan publik dalam memperkuat legitimasi pemerintah,

penelitian ini mempertegas bahwa perbedaan karakteristik sektor publik dan swasta membuat kebutuhan akan standar etika di sektor publik menjadi lebih mendesak (Kurniawan, 2017). Dalam konteks ini, faktor-faktor yang memengaruhi penerapan etika meliputi kepemimpinan moral, budaya organisasi yang etis, transparansi proses administrasi, serta adanya sistem akuntabilitas yang efektif. Sebagai contoh konkret, dalam sebuah wawancara yang dilakukan terhadap ASN di lingkungan kementerian, responden menyatakan, "Transparansi dalam prosedur pelayanan dan keterbukaan informasi kepada publik sangat membantu membangun kepercayaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang," yang memperkuat pentingnya etika sebagai pilar pelayanan publik (Amatulloh et al., 2021).

Penelitian ini juga menemukan bahwa penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah secara global sering kali berakar dari pelanggaran etika, seperti korupsi, ketidaktransparanan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Data Transparency International (2023) menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi di banyak negara, termasuk Indonesia, masih menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap institusi negara. Hal ini menguatkan argumen bahwa penerapan etika yang kuat dalam administrasi publik bukan hanya sebuah kebutuhan normatif, tetapi juga strategis untuk menjaga stabilitas politik dan sosial (Budiman et al., 2022). Dengan menghubungkan persepsi masyarakat terhadap pemerintah dan tingkat integritas birokrasi, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperjelas bahwa keberhasilan administrasi publik tidak hanya bergantung pada kompetensi teknis, tetapi juga pada kepekaan moral dan komitmen etis para penyelenggara negara. Oleh karena itu, memperkuat etika administrasi publik menjadi langkah kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dalam sistem demokrasi modern (Budiman et al., 2022).

Jadi dapat disimpulkan, bahwa urgensi etika administrasi publik tidak hanya bersangkutan kepada tingkat kepercayaan masyarakat saja. Namun, etika administrasi publik juga dapat mempengaruhi kualitas pemerintah dari segi pelayanan maupun kinerja yang terdapat didalamnya. Dengan demikian, etika dalam administrasi publik memberikan panduan tentang tindakan yang harus diambil oleh para pemangku kepentingan publik dalam melaksanakan kebijakan politik (Eko Yudianto et al., 2024). Selain itu, etika ini juga berfungsi sebagai kriteria untuk menilai apakah perilaku administrator publik dalam menjalankan kebijakan politik dapat dianggap sebagai baik atau buruk. Dengan mematuhi prinsip-prinsip yang ada, dapat memastikan apakah para pemangku kepentingan dapat bertindak selaras dengan nilai-nilai moral dan norma-norma yang diterima oleh masyarakat, sehingga memperkuat kepercayaan dan legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi administrator publik untuk memahami dan menerapkan etika administrasi publik dalam setiap langkah kebijakan yang mereka ambil, sehingga dapat membangun pondasi yang kuat bagi pemerintah yang berintegritas dan bertanggung jawab kepada masyarakat (Simarmata & Sutrisno, 2022).

Beberapa aspek yang mencakup urgensi krusial etika administrasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yakni:

1) Memperkuat Legitimisasi Pemerintah

Legitimisasi pemerintah merupakan kunci keberhasilan bagi suatu rezim atau sistem politik, etika administrasi publik memainkan peran penting dalam membangun dan memperkuat legitimisasi pemerintahan. Ketika pemerintah menjalankan tugasnya dengan integritas, kejujuran dan keadilan, maka hal ini akan berdampak secara langsung kepada masyarakat, dimana masyarakat akan lebih cenderung untuk memberikan dukungan dan kepercayaan pada pemerintah mereka (Andriansyah et al., 2019). Ini menjadi suatu urgensi karena legitimasi pemerintah memengaruhi tingkat stabilitas politik, kepatuhan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi pemerintah. Pentingnya legitimasi

pemerintah dapat dilihat melalui beberapa konflik sosial dan politik yang kerap terjadi, dimana kepercayaan terhadap pemerintah rendah (Zuliah & Pulungan, 2020). Masyarakat yang percaya kepada kejujuran dan integritas pemerintah, akan memiliki kecenderungan untuk lebih patuh terhadap hukum dan peraturan, yang pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas politik. Dengan demikian, melalui praktik etika yang baik dalam administrasi publik, pemerintah dapat memperkuat dan memelihara legitimitasnya di pandangan masyarakat (Eko Yudianto et al., 2024).

2) Penggunaan Sumber Daya Publik Yang Efisien

Penggunaan sumber daya publik yang efektif dan efisien merupakan aspek yang sangat penting dari adanya etika administrasi publik. Ketika pemerintah menggunakan anggaran dan fasilitas publik dengan bijaksana dan efektif, dengan begitu mereka menunjukkan tanggung jawab mereka kepada masyarakat. Etika administrasi publik mengahruskan pemerintah untuk menghindari pemborosan, penyalahgunaan jabatan, hingga korupsi dalam pengelolaan sumber daya publik (Mauliddiyah, 2021). Dalam konteks ini, peran transparansi tentunya akan sangat dibutuhkan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kepentingan yang bersangkutan langsung dengan pemerintah dikelola dengan efektif, apabila pemerintah mampu untuk melakukan hal ini, secara tidak langsung mereka mampu untuk emmbangun kepercayaan masyarakat. Praktik etika yang baik dalam administrasi publik tidak hanya mencakup penggunaan sumber daya yang efisien tetapi juga transparansi dalam pelaporan dan akuntabilitas dalam penggunaannya (Waluyo & Syarifuddin, 2022).

3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Salah satu tujuan utama administrasi publik adalah emberikan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Dimana peran etika administrasi sangat penting dalam memastikan bahwa layanan-layanan yang akan direalisasikan kepada masyarakat memiliki standar yang tinggi dan memprioritaskan kebutuhan utama masyarakat. Ketika pemerintah dan lembaga publi bertindak dengan integritas, akuntabilitas dan keadilan, maka layanan publik pun cenderung menjadi lebih responsif dan efektif (Bisri & Asmoro, 2019). Dalam meningkatkan kualitas layanan publik, etika administrasi publik juga mencakup responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Administrasi berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarkat, seperti memberikan respon dengan cepat terhadap keluhan yang dirasakan masyarakat, memberikan informasi yang jelas dan akurat, mengedepankan layanan yang dapat diandalkan, hingga mengatai masalah dengan cepat dan efisien. Secara tidak langsung, etika administrasi publik tidak hanya penting untuk membangun kepercayaan masyarakat saja tetapi juga ubtu meningkatkan kualitas hidup mereka (Waluyo & Syarifuddin, 2022).

4) Pencegahan Korupsi Dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Salah satu tantangan terbesar yang mampu memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. etika administrasi publik selalu mengedepankan kepada integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Ketika pemerintah dan pejabat publik bertindak dengan jujur dan andil, maka mereka dapat membawa dampak yang baik dalam memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. pencegahan korupsi melalui praktik etika yang baik dalm administrasi publik sangat penting, karena seperti yang kita ketahui tindakan korupsi dapat berdampak secara luas (Eko Yudianto et al., 2024). Tindakan korupsi tidak hanya merugikan dari sisi pemerintahan saja, namun dapat berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Korupsi politik dapat melibatkan keputusan yang dibuat oleh para pemimpin politik, dan kerap terjadi di dalam struktur politik. Tentunya situasi

ini sering kali terjadi ketika politisi dan pejabat negara yang seharusnya bertugas dalam tindakan korupsi (Budiman et al., 2022). Korupsi politik terjadi ketika para pengambil keputusan politik menggunakan kekuasaan mereka untuk mempertahankan status, kekuasaan, dan kekayaan mereka sendiri (Nurmitae, 2024). Kontras dengan korupsi birokrasi, yang terjadi dalam ranah administrasi publik dalam pelaksanaan kebijakan politik, korupsi politik terjadi di tingkat sistem politik dan melibatkan para pembuat keputusan politik. Sementara pada korupsi politik, melibatkan para pemimpin politik dan terjadi di tingkat sistem politik, namun pada korupsi birokrasi melibatkan pelaksanaan kebijakan politik (Amatulloh et al., 2021). Korupsi birokrasi tidak melibatkan politisi terpilih, melainkan melibatkan staff yang bekerja dalam struktur administrasi negara seperti layanan sipil, kementerian, dan lembaga pelayanan publik lainnya. Tentunya tindakan korupsi yang kerap terjadi ini, dapat menghalangi pembangunan ekonomi, menghambat investasi asing, dan menciptakan ketidaksetaraan sosial yang lebih besar. Dengan memperkuat prinsip-prinsip etika dalam administrasi publik, maka pemerintah dapat membangun pondasi yang kuat khususnya untuk pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Kurniawan, 2017). Hubungan antara tata kelola yang etis dan kepercayaan masyarakat memiliki sifat yang saling memengaruhi satu sama lain, di mana kepercayaan terhadap nilai-nilai etika dan proses tata kelola yang baik menjadi bagian integral dari sebuah sistem yang berfungsi dengan baik. Dalam konteks ini, kepercayaan publik menjadi sebuah komponen yang tak terpisahkan dari tata kelola yang etis. Sebuah fakta yang terbukti adalah bahwa tingkat korupsi cenderung meningkat ketika tidak ada pedoman etika atau kode etik yang jelas untuk diikuti, atau ketika petugas publik tidak mematuhi standar etika yang telah ditetapkan (Taufiqurokhman et al., 2024).

PEMBAHASAN

Aliran Dan Pendekatan Dalam Etika Administrasi Publik

Pendekatan dan aliran etika dalam administrasi publik merupakan respons terhadap tuntutan akan tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih. Perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi telah menuntut adanya prinsip-prinsip etika yang diterapkan dalam setiap langkah proses administrasi publik (Bisri & Asmoro, 2019). Seiring dengan evolusi pemikiran dan praktek administrasi publik, masyarakat semakin menyadari perlunya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan urusan pemerintahan. Kasus korupsi dan kegagalan pemerintah menjadi dorongan utama munculnya pendekatan etika dalam administrasi publik. Kasus-kasus korupsi yang kerap terjadi telah menyebabkan tuntutan akan perlunya standar moral yang lebih tinggi dalam pelayanan publik. Oleh karenanya, pentingnya integritas dan moralitas dalam setiap aspek tindakan administrasi publik menjadi semakin terlihat dampaknya (Kurniawan, 2017).

Dalam menjelaskan aliran dan pendekatan dalam etika administrasi publik, penulis akan menjabarkan empat aliran etika administrasi publik, yaitu Aliran Sosialisme (Tokoh penting dalam aliran ini adalah Karl Marx); Aliran Hedonisme (dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hedonistik dari Aristippos dan Epicurus); Aliran Intuisisme (pengikut aliran ini, seperti G.E. Moore dengan teori "Goodness"); Aliran Utilitarianisme (dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill). Sedangkan pendekatan dalam etika administrasi publik, yaitu: Pendekatan Deontologi (dipopulerkan oleh Immanuel Kant); Pendekatan Teleologi (Tokoh seperti John Stuart Mill dengan teori utilitarianismenya).

Aliran Sosialisme

Aliran sosialisme, baik dan buruk ditentukan berdasarkan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat. Individu yang mematuhi dan mengikuti adat istiadat dianggap baik, sementara mereka yang menentang atau tidak mengikuti adat istiadat dianggap buruk. Orang-orang yang melanggar aturan adat dapat dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga dan mematuhi tradisi serta nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam pandangan aliran sosialisme, adat istiadat menjadi pedoman moral yang mengatur perilaku individu dan memastikan kohesi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, kesetiaan terhadap adat istiadat dianggap sebagai tanda kesetiaan terhadap nilai-nilai sosial dan kepentingan bersama (Poedjawijatna (1986: 139).

Aliran Hedonisme

Aliran hedonisme, tindakan yang dianggap baik adalah tindakan yang memberikan kesenangan, kenikmatan, atau kepuasan kepada individu. Konsep ini menekankan bahwa nilai suatu tindakan ditentukan oleh sejauh mana tindakan tersebut memberikan kelezatan atau kenikmatan bagi individu yang melakukannya. Hedonisme menyarankan bahwa individu cenderung memilih tindakan yang memberikan pengalaman positif, seperti kesenangan dan kepuasan, daripada pengalaman negatif seperti rasa sakit atau penderitaan. Hedonisme tidak mengatakan bahwa semua tindakan selalu membawa kesenangan. Terdapat pula tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan atau keburukan. Apabila individu dihadapkan pada pilihan antara tindakan yang mendatangkan kesenangan dan tindakan yang mendatangkan keburukan, sudah dipastikan setiap individu akan memilih tindakan yang membawa kesenangan. Hedonisme memberikan wawasan bahwa individu memiliki dorongan alami untuk mencari kepuasan dan menghindari penderitaan. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan atau melakukan tindakan, individu cenderung memilih apa yang mereka anggap akan memberikan kepuasan atau kenikmatan secara keseluruhan. Dalam pandangan hedonisme, kebaikan atau keburukan suatu tindakan diukur berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut dapat memnuhi kebutuhan akan kesenangan dan kepuasan individu (Kartasmita (1997: 203).

Aliran Intuisisme

Aliran intuisisme, meyakini bahwa setiap individu memiliki naluri batin yang memungkinkannya membedakan antara apa yang baik dan yang buruk secara langsung. Adanya naluri ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengaruh masa dan lingkungan tetapi pada dasarnya tetap merupakan bagian dari hakikat manusia (Mauliddiyah, 2021). Ketika individu dihadapkan pada suatu perbuatan, mereka mengalami semacam pemahaman instan yang memberi mereka wawasan mengenai nilai perbuatan tersebut, yang kemudian mereka gunakan untuk menentukan moralitasnya. Dalam intuisisme, keyakinan pada naluri batin ini menjadi dasar untuk menilai tindakan-tindakan baik dan buruk. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa kebijaksanaan moral tidak hanya bersumber dari pemikiran rasional, tetapi juga dari pemahaman intuitif yang mendalam (Poedjawijatna (1986: 139).

Aliran Utilitarianisme

Aliran utilitarianisme mengacu terhadap konsep kegunaan atau manfaat. Dimana suatu tindakan dianggap baik secara moral jika dapat memberikan manfaat atau kebahagiaan yang dampaknya dirasakan langsung oleh orang lain. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill adalah dua tokoh utama yang menganut paham ini (Priyastiwi, 2017). Bentham mengungkapkan prinsip

utilitarianisme dengan frase "the greatest happiness of the greatest number," yang menekankan bahwa kebaikan adalah menciptakan kebahagiaan sebanyak mungkin individu. Kebaikan dapat diukur dari seberapa banyak manfaat yang diberikan kepada individu atau masyarakat secara keseluruhan. Aliran utilitarianisme dapat diterapkan secara individual, yang dapat mengacu terhadap manfaat yang diterima baik secara individu maupun secara sosial (Mauliddiyah, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran pada suatu tindakan dapat dianggap baik jika menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan. Aliran utilitarianisme menjadi salah satu pendekatan yang menekankan pentingnya manfaat atau kegunaan dalam menentukan moralitas suatu tindakan (Kartasasmita 1997:203).

Pendekatan Teleologi

Pendekatan Teleologi, di sisi lain, berfokus pada tujuan atau hasil dari tindakan dalam menentukan apakah tindakan tersebut etis. Pendekatan ini berargumen bahwa tindakan yang benar adalah yang menghasilkan hasil terbaik bagi jumlah orang terbanyak, dan sering dikaitkan dengan Utilitarianisme, yang merupakan salah satu bentuk teleologi. John Stuart Mill, seorang tokoh sentral dalam aliran ini, mengembangkan ide-ide utilitarianisme dalam bukunya "Utilitarianism" (1863), di mana ia mengemukakan bahwa tindakan etis adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (Handbook of Homeric Study, 2025).

Teleologi dalam administrasi publik menekankan bahwa administrator publik harus membuat keputusan berdasarkan hasil yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, keputusan yang baik adalah yang menciptakan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang, seperti yang dicontohkan dalam kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Mill's utilitarianism sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan publik yang mempertimbangkan kesejahteraan kolektif, meskipun beberapa kritik terhadap utilitarianisme mencatat tantangan dalam mengukur kebahagiaan atau manfaat secara objektif (Budiman et al., 2022).

Pendekatan Deontologi

Pendekatan Deontologi berfokus pada kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh individu, tanpa memandang hasil atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Pendekatan ini berlandaskan pada pandangan bahwa ada prinsip moral universal yang harus diikuti, terlepas dari keuntungan atau kerugian yang timbul dari tindakan tersebut. Immanuel Kant adalah tokoh utama dalam pendekatan deontologi ini. Dalam karya klasiknya, "Groundwork of the Metaphysics of Morals" (1785), Kant menekankan pentingnya melakukan tindakan sesuai dengan kewajiban moral yang diatur oleh hukum moral universal, yang ia sebut sebagai "categorical imperative". Kant mengajarkan bahwa tindakan harus dilakukan karena kewajiban moral, bukan berdasarkan pada akibat atau hasil yang diperoleh (Mauliddiyah, 2021). Pendekatan ini diterjemahkan dalam administrasi publik sebagai kewajiban moral bagi administrator untuk selalu bertindak sesuai dengan prinsip yang benar, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi, terlepas dari apa yang mungkin diuntungkan oleh masyarakat atau negara. Kantian deontologi ini mengajarkan bahwa administrator publik harus menghormati hak individu dan bertindak dengan integritas, bahkan jika hal itu berarti mengorbankan hasil yang lebih menguntungkan bagi mayoritas (Irwansyah et al., 2023).

SIMPULAN

Urgensi etika dalam administrasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat adalah esensial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan suatu pemerintah atau negara. Pendekatan etika yang konsisten akan memastikan bahwa para pemangku kepentingan bertindak dengan integritas, keadilan, dan akuntabilitas, yang pada gilirannya memperkuat hubungan antara lembaga publik dan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar etika yang kuat dapat mencegah risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang sering kali merusak kepercayaan publik. Tanpa adanya standar etika yang kuat, risiko korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan yang terus meningkat, tentunya hal ini akan mengakibatkan rusaknya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Implikasi temuan ini penting bagi pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan yang mengutamakan etika, serta bagi akademisi untuk menggali lebih dalam penerapan etika dalam konteks administrasi publik. Saran dari hasil penelitian selanjutnya, agar dapat memperluas objek kajian ke sektor-sektor lain yang terlibat dalam pelayanan publik guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai dampak penerapan etika terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, A. (2017). Urgensi Etika Dalam Tata-Kelola Pemerintahan (Governance). *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(2), 79. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n2.p79-89>
- Agus Subagyo. (2020). Aplikasi Metode Riset: Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mix Methods. In *Inteligenia Media* (Issue October).
- Amatulloh, D., Kurniawan, T., Zuliah, A., Pulungan, M. A., Mauliddiyah, N. L., Eko Yudianto, Mareta Syamsya, Ahmad Mustofa, Syarla Fian, Hermawan Nasution, Bisri, M. H., Asmoro, B. T., Budiman, Aditya Ferlan Farhanuddin, Astri Ayulia Putri Setia, & Diella Jauza. (2021). Analisis Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Mal Pelayanan Publik Bojonegoro. *Law Jurnal*, 1(1), 6. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.65>
- Andriansyah, A., Taufiqurokhman, T., & Wekke, I. S. (2019). Responsiveness of public policy and its impact on education management: An empirical assessment from Indonesia. *Management Science Letters*, 9(3), 413–424. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2018.12.008>
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>
- Budiman, Aditya Ferlan Farhanuddin, Astri Ayulia Putri Setia, & Diella Jauza. (2022). Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 64–74. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.65>
- Dewi Rokhmah, Iken Nafikadini, E. I. (2009). Penelitian Kualitatif. In *Journal Equilibrium: Vol. 5 No. 9* (Issue 127). Prenada Media Group. yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf
- Eko Yudianto, Mareta Syamsya, Ahmad Mustofa, Syarla Fian, & Hermawan Nasution. (2024). Urgensi Etika Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pelayanan Publik. *Jurnal Niara*, 17(1), 162–170. <https://doi.org/10.31849/niara.v17i1.19633>
- Handbook of Homeric Study* (Vol. 2, Issue 1). (2025).
- Hasan, S. (2023). Penelitian kualitatif. *Syria Studies*, 7(1), 37–72. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Irwansyah, D., Hotman, F., Damanik, S., Judijanto, L., Jakarta, U. M., Sunan, U. I. N., Djati, G., Negeri, U., Riset, B., & Jakarta, I. (2023). Urgensi Etika Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pelayanan Publik. *Cahaya Mandalika*, 03(02), 1796–1803. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2.2390>
- Kurniawan, T. (2017). Pergeseran Paradigma Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(23), 1–23.
- Margareth, H. (2017). MAL ADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK. *Экономика Региона*, 32.

- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71–84. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679>
- Mauliddiyah, N. L. (2021). *PENERAPAN ETIKA DALAM ADMINISTRASI PUBLIK APARATUR NEGARA*. 6(1), 6.
- Nurmitae, T. (2024). Relasi dan Pengaruh Budaya terhadap Kebijakan Publik: Analisis Faktor-Faktor dalam Pembuatan Kebijakan. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 44801, 8, 44801–44805. <https://doi.org/10.31004/jptam>
- Panjaiitan, D. T. M. R., & Pardede, P. D. kristian. (2021). *Adminitrasi publik*. 88–101.
- Parinata, D., & Puspaningtyas, N. D. (2022). Studi Literatur: Kemampuan Komunikasi Metematis Mahasiswa Pada Materi Integral. *Jurnal Ilmiah Matematika Realistik (JI-MR)*, 3(2), 94. <https://doi.org/https://doi.org/10.33365/ji-mr.v3i2.2170>
- Priyastiwati, P. (2017). Karakteristik Dan Gaya Kepemimpinan Organisasi Sektor Publik. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 25(1), 1–12. <https://doi.org/10.32477/jkb.v25i1.227>
- Purnama, N., Miskiyah, A., & Khoirul Anwar, M. (2023). Upaya Pencegahan Maladministrasi Oleh OMBUDSMAN Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 1(1), 17–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i1.276>
- Simarmata, N. Y., & Sutrisno, E. (2022). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 4(2), 37–48.
- Sunan, I., & Surabaya, A. (2013). Jurnal ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK Holilah. *Review Politik*, 03(02), 232–255.
- Syariah, K. B., & Ilmu, G. (n.d.). *ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK; PERANANNYA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*. september 2016, 1–6.
- Taufiqurokhman, T., Satispi, E., Andriansyah, A., Murod, M., & Sulastri, E. (2024). The impact of e-service quality on public trust and public satisfaction in e-government public services. *International Journal of Data and Network Science*, 8(2), 765–772. <https://doi.org/10.52677/j.ijdns.2024.1.002>
- Waluyo, D., & Syarifuddin. (2022). Praktik sosialisasi kebijakan publik pada era digital practice of public policy socialization in the digital age. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 3(1), 1–8. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/5018>
- Zuliah, A., & Pulungan, M. A. (2020). Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia. *Law Jurnal*, 1(1), 32–42. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.786>